

## Perkembangan Politik Kota Bandung (2008-2018)

Salsabillah Nur Fitriah<sup>1</sup>, Gaitsa Fitri<sup>2</sup>, Gevira Fitri Nur Wilda<sup>3</sup>, Irfan Arif Rahman<sup>4</sup>, Reina Amanda Putri<sup>5</sup>, Yudis Faizal Heres<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Universitas Siliwangi; 222171080@student.unsil.ac.id

<sup>2</sup> Universitas Siliwangi; 222171085@student.unsil.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Siliwangi; 222171112@student.unsil.ac.id

<sup>4</sup> Universitas Siliwangi; 222171142@student.unsil.ac.id

<sup>5</sup> Universitas Siliwangi; 222171150@student.unsil.ac.id

<sup>6</sup> Universitas Siliwangi; 222171153@student.unsil.ac.id

**Abstrak:** Dalam perkembangan politik kota Bandung tahun 2008 hingga 2018 terdapat kebijakan- kebijakan yang berdampak pada perkembangan politik kota Bandung. Tujuan artikel ini yaitu untuk memberikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Walikota dan Pemerintah Kota Bandung, serta dampak dari perkembangan politik di era tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo, di mana terdapat lima tahapan metode yang digunakan yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Walikota tentunya memiliki berbagai kebijakan yang diterapkan untuk mewujudkan kota yang tertata baik dari segi infrastruktur dan regulasi. Hal ini juga berlaku bagi Kota Bandung yang tentunya mempunyai kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Walikota untuk menjadikan Kota Bandung menjadi kota yang lebih baik lagi. Adapun kebijakan dan program yang dijalankan pada periode 2008 hingga 2013 diantaranya yaitu Program LLI Nyaah Ka Kolot, penataan pkl, dan pelayanan spm Trans Metro Bandung. Sedangkan pada periode 2013 hingga 2018 diantaranya yaitu relokasi PKL, Bandung smart city, Bandung sejuta biopori, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). Kebijakan Walikota merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk menjadikan kawasan yang maju baik bagi masyarakat dalam kota maupun luar kota. Tentunya setiap kebijakan yang diterapkan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, walaupun masih terdapat masyarakat yang berpandangan negatif terhadap kebijakan yang berlaku.

DOI: <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i4.143>

\*Correspondensi: Salsabillah Nur Fitriah

Email: 222171080@student.unsil.ac.id

Received: 27 Februari 2024

Accepted: 27 Maret 2024

Published: 28 April 2024



**Copyright:** © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

biopores, the Regional Development and Empowerment Innovation Program (PIPPK). The Mayor's policy is one strategy that can be implemented to make the area developed for both people in the city and outside the city. Of course, every policy implemented has a positive impact on people's lives, although there are still people who have a negative view of the policies in force.

**Key words:** Politics; Policy; Bandung

## Pendahuluan

Politik merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia, yang berperan penting dalam membentuk negara, masyarakat, juga hubungan antar negara. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa politik merupakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan dalam suatu negara yang menyangkut masyarakat baik dari segi sosial maupun ekonomi. Politik selalu bersangkutan dengan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh masyarakat umum bukan hanya oleh per-individu saja, dimana kegiatan politik ini diselenggarakan secara berkelompok. Joyce Mitchell berpendapat bahwa Politik merupakan tindakan dalam mengambil keputusan secara bersama-sama atau membuat kebijakan umum yang diberlakukan untuk seluruh masyarakat (Burdiadjo, 1982). Artinya setiap keputusan yang diambil dari kegiatan pemerintah diputuskan bukan oleh individu tapi diputuskan oleh bersama.

Politik erat kaitannya dengan sejarah. Sejarah dalam ilmu politik dijadikan sebagai dasar untuk menemukan fakta-fakta dan data-data dari masa lampau yang dapat diolah menjadi solusi dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Seperti yang dikatakan oleh Sir John Robert, *"History is past politics, politics is present history"*, hal tersebut menunjukkan bahwa politik dan sejarah itu saling berkaitan erat (Kuntowijoyo, 2003). Maka, sangat penting sekali untuk mempelajari sejarah politik, supaya tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan dimasa lampau, dan juga kita bisa menarik solusi untuk kehidupan politik masa depan.

Dalam kehidupan manusia yang semakin berkembang pesat, politik juga mengalami perkembangan dari masa ke masa di berbagai negara. Seperti di Indonesia yang sudah memiliki kehidupan politik sendiri setelah pembacaan naskah Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu Indonesia memiliki corak kehidupan politik yang ditentukan sendiri oleh bangsa Indonesia hingga berkembang pada masa dewasa kini. Perkembangan dalam kegiatan politik di Indonesia semakin menunjukkan kemajuan dengan dibentuknya partai-partai politik dimana masyarakat juga ikut terjun ke dalam dunia politik. Seiring berjalannya waktu, politik di Indonesia akan semakin berkembang dipengaruhi oleh kegiatan, langkah dan juga keputusan politik dari pelaku utama politik baik itu dari dalam pemerintahan maupun dari luar pemerintahan (Noor, 2001).

Kebijakan pemerintahan disetiap daerah tentu memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat. Berbagai daerah di Indonesia tentu tidak akan maju atau teratur tanpa adanya kebijakan yang diberlakukan. Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami perkembangan yang positif adalah Kota Bandung, Jawa Barat. Tentu sudah tidak asing dengan Kota Bandung yang memiliki sejuta pesona menarik perhatian orang-orang yang tinggal diluar kota tersebut untuk berkunjung. Selain terkenal dengan tempat-tempat wisata dan jalannya yang unik, Bandung juga terkenal akan sejarahnya. Peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah pernah berlangsung di Bandung diantaranya, Peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 24 Maret 1946, Bandung dibumihanguskan oleh para pejuang dan rakyat setempat agar tidak dimanfaatkan Pasukan Sekutu dan NICA dari Belanda untuk dijadikan markas (Parinduri, 2022). Konferensi Asia Afrika juga menjadi sejarah yang tercatat, dimana KAA ini terjadi pada 18-24 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung, hingga saat ini pun bukti dari KAA yang terjadi di Bandung

masih dapat kita saksikan. Dari zaman Kolonial hingga Dewasa kini Bandung mengalami perubahan yang bertahap baik dari kondisi sosial, politik maupun ekonomi. Hal tersebut tentu tidak lepas dari peran pemerintah daerah Kota Bandung yang memberikan pengaruh terhadap masyarakat Kota Bandung. Kebijakan di berbagai kota maupun daerah tentu sama-sama mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan kemajuan yang terstruktur dan tertata, begitu juga dengan setiap kebijakan yang diberlakukan terhadap masyarakat Kota Bandung yaitu untuk membawa kondisi Kota Bandung kearah yang lebih baik dan maju baik dari segi infrastruktur, lingkungan maupun masyarakatnya (Nambo & Pulu, 2005). Bandung yang terkenal dengan julukan Kota Kreatif tentu tidak lepas dari peran Walikota dan Pemerintah Kota Bandung yang bekerjasama dengan masyarakat (Miftah, 2016). Hal tersebut menjadikan Kota Bandung sangat menarik dari berbagai aspeknya, terutama dalam perkembangan politiknya.

Pada rentang waktu 2008-2018 di ranah politik Bandung, beberapa hal menarik termasuk perubahan kepemimpinan, pembangunan infrastruktur, dan dinamika politik lokal (Egner, 2018; Heinelt, 2018; Kona, 2019, 2021; Lu, 2020). Walikota Bandung pada periode tersebut adalah Dada Rosada (2008-2013) dan Ridwan Kamil (2013-2018). Selama kepemimpinan Ridwan Kamil, terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur, inisiatif kota kreatif, dan fokus pada peningkatan kualitas hidup warga. Selama periode 2008-2018, Kota Bandung mengalami sejumlah peristiwa politik yang signifikan. Beberapa hal melibatkan pergantian kepemimpinan, kebijakan pembangunan, dan dinamika politik lokal. Pergantian kepemimpinan dari Dada Rosada ke Ridwan Kamil pada 2013 memunculkan perubahan arah kebijakan dan penekanan pada pembangunan infrastruktur serta inisiatif kota kreatif. Terdapat pula dinamika politik lokal, seperti pemilihan umum dan kebijakan yang mencerminkan respons terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat Kota Bandung.

Dari paparan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat “Perkembangan Politik Kota Bandung (2008-2018)” sebagai judul artikel ini. Permasalahan yang akan diangkat dalam artikel ini yaitu mengenai kebijakan apa saja yang diterapkan oleh Walikota dan Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2008-2018, serta menganalisis dampak dari perkembangan politik di Kota Bandung pada tahun 2008-2018. Penulis ingin artikel ini bermanfaat sebagai pengetahuan mengenai sejarah politik yang dapat menginspirasi pembaca. Dengan mengangkat tema ini penulis juga ingin pembaca dapat memahami bahwa mempelajari hal-hal mengenai politik dapat memperkaya wawasan mengenai negara dan segala aspeknya sehingga dapat membantu kita peka terhadap kondisi negara saat ini.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah metode penelitian historis menurut Kuntowijoyo, dimana ada lima langkah metode penelitian yaitu pemilihan topik, *heuristic*, *verifikasi*, *interpretasi* dan *historiografi*. Dalam tahapan pemilihan topik, penulis memilih perkembangan kebijakan politik Kota Bandung pada tahun 2008-2018 serta dampak yang terjadi dari perkembangan politik tersebut, sehingga mengambil

judul artikel yaitu “Perkembangan Politik Kota Bandung Tahun 2008-2018” sebagai topik bahasan dalam artikel ini yang akan diteliti.

Tahapan selanjutnya yaitu *Heuristik* atau pengumpulan sumber, dalam pengumpulan sumber penulis menggunakan teknik Studi Pustaka atau pengumpulan informasi yang sesuai atau relevan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti melalui buku-buku, jurnal, artikel yang diolah kembali oleh penulis. Sebagai sumber primer diambil dari dokumen Peraturan Daerah Kota Bandung dan Keputusan Walikota Kota Bandung yang didapatkan dari laman resmi *JDIH Kota Bandung*. Sumber Sekunder yang dipakai dalam artikel ini diambil dari beberapa buku dan jurnal-jurnal terkait topik bahasan, selain itu juga sumber yang berasal dari internet seperti laman *web page*, *google scholar*, *Bandung.go.id*, *JDIH.DPRD.Bandung.go.id*, *kominfo.go.id*, dan *Kompas.com* yang dapat diakses secara online.

Tahap selanjutnya, penulis memverifikasi kembali sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan apakah sumber tersebut dapat dibuktikan benar atau tidak faktanya dan kredibel dengan dua macam verifikasi yaitu verifikasi ekstern yang berarti sumber yang didapatkan asli atau tidak, dan verifikasi Intern dimana sumber-sumber yang telah dikumpulkan dapat dipercaya atau tidak. Dalam penelitian ini sumber-sumber yang digunakan dapat dibuktikan kebenarannya karena pergerakan politik dan kebijakan di Kota Bandung terlihat secara nyata dan dapat dibuktikan dari dokumen peraturan-peraturan resmi Pemerintah Kota Bandung serta dilihat dari jurnal-jurnal yang mengusut permasalahan yang cocok dengan topik.

Selanjutnya dalam tahap *Interpretasi*, penulis telah melakukan analisis sumber untuk menemukan fakta sejarah dan juga melakukan sistesis dengan menghubungkan satu fakta sejarah dengan fakta sejarah lainnya. Dalam tahap interpretasi, sumber-sumber yang sebelumnya dilakukan proses verifikasi digali fakta-fakta yang terkait dengan topik bahasan, dimana kebijakan politik di Kota Bandung tahun 2008-2018 mengalami perkembangan dalam setiap periodenya, dari periode Dada Suhada (2008-2013) hingga Ridwan Kamil (2013-2018) yang berinovasi dalam program dan kebijakannya hal tersebut juga memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat Kota Bandung pada masa itu.

Tahapan terakhir yaitu *Historiografi* atau penulisan sejarah. Penyusunan historiografi dilakukan setelah fakta-fakta sejarah yang sudah di interpretasi secara kronologis. Artikel ini disusun setelah melewati proses-proses sebelumnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari sumber-sumber yang kemudian disatukan menjadi suatu fakta.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Kebijakan Walikota dan Pemerintah Kota Bandung Periode Tahun 2008-2018

#### 1. Kebijakan Walikota dan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2008-2013

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Walikota tentu memiliki berbagai kebijakan yang akan diberlakukan untuk mewujudkan Kota yang tertata baik secara infrastruktur maupun peraturannya (Noor, 2001). Berlaku juga di Kota Bandung yang tentu saja memiliki kebijakan yang diberlakukan oleh Walikota untuk menjadikan Kota Bandung menjadi kota yang lebih baik lagi. Pada periode tahun 2008 Bandung memilih Dr. H. Dada Rosada, S.H.,

M.Si. sebagai Walikota Bandung dengan masa jabatan yaitu tahun 2008-2013, dimana beliau juga pernah menjabat sebagai Walikota Bandung periode tahun 2003-2008. Dalam menjalankan perannya sebagai Walikota tentu Ia memiliki sejumlah kebijakan yang berlaku di Kota Bandung diantaranya yaitu:

### 1) Penataan dan Penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima)

Walikota Bandung Dada Rosada mengeluarkan kebijakan mengenai penertiban PKL atau pedagang kaki lima yang sering berjualan di sekitar Alun-alun Bandung. Selain mengakibatkan kemacetan, adanya PKL yang sering berdagang di trotoar atau di pinggir jalan juga mengganggu kenyamanan dan ketenangan masyarakat pengguna jalan, selain itu juga menyebabkan berserakannya sampah hasil berdagang atau pembeli yang mengganggu. Walikota Bandung yang menjabat pada masa itu memberikan kompensasi kepada para PKL untuk pulang ke kampung halamannya masing masing (E., 2019; Einstein, 2018; Pu, 2018; Purtle, 2018; Qin, 2020). Pemerintah Kota Bandung menyiapkan dana sebesar 2,25 miliar untuk menertibkan dan memberi kompensasi kepada PKL yang berada di tujuh titik bebas PKL, hal tersebut dilakukan sebagai perlindungan terhadap hak publik. Penertiban PKL dilakukan secara manusiawi dengan pemberian dana sebagai kompensasi untuk membuka usaha ditempat yang lebih layak. Wali Kota Bandung pada masa itu yaitu Dada Rosada mengatakan bahwa para PKL sudah berjanji tidak akan berjualan Kembali di Alun-Alun Kota Bandung. Selain itu, Pemerintah juga melakukan penertiban terhadap PKL dikawasan lain. Para Dewan juga memantau terhadap pemulangan para PKL, jika mereka Kembali berjualan dewan akan memanggil dinas terkait penertiban PKL, menurut data 90 persen diketahui bahwa para PKL itu berasal dari luar kota Bandung. Penertiban PKL tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima (Wicaksono & Rachmawati, 2015).

### 2) SPM Angkutan Umum Trans Metro Bandung

Salah satu kebijakan Walikota Bandung Periode 2008-2013 adalah dalam SPM atau standar pelayanan minimal terhadap angkutan umum Trans Metro Bandung. Bus Trans Metro Bandung merupakan angkutan umum dengan tarif yang murah untuk digunakan masyarakat Bandung (Gea, 2018). Dinas Perhubungan Kota Bandung dibantu dengan pelaksana teknis dari Trans Metro Bandung akan mengawasi pelaksanaan pengoprasian bus Trans Metro Bandung. Hal ini sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Bandung nomor 265 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, yang menyatakan bahwa organisasi Unit Pelaksana teknis BusTrans Metro Bandung terdiri atas kepala UPT Trans Metro Bandung, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala Subag Tata Usaha, dan Petugas Operasional.

Bus Trans Metro Bandung memiliki jadwal pemberangkatan bus yang teratur, bus akan berhenti pada halte yang telah disediakan, selain itu bus juga dilengkapi dengan fasilitas yang aman, nyaman dan memiliki tarif harga yang merakyat, hal tersebut sesuai dengan Undang-undang 22 tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan pasal 158 ayat (1) dan ayat (2).

### 3) LLI Jabar "Nyaah Ka Kolot"

Dalam mewujudkan bentuk hormat terhadap orang tua, H. Dada Rosada membuat program “Nyaah ka Kolot” atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan “sayang terhadap orang tua” (Hari, 2016). Dengan mewujudkan program ini Walikota Bandung percaya bahwa kemartabatan masyarakat Bandung dalam cara bersikap serta berperilaku terhadap orang tua akan meningkatkan rasa hormat. Pemerintah berupaya untuk mensejahterakan lansia dalam kebutuhan dasar dibidang perumahan, lingkungan dan ekonomi melalui Bawaku Lansia.

Pada tahun 2011 para lansia mendapat dana dari pemerintah sebesar Rp. 500 Juta melalui Bawaku Lansia Kota Bandung yang telah konsisten memberikan dana sejak 2009 (Hari, 2016). Walikota Bandung periode tersebut berharap bahwa bantuan yang diberikan terhadap para lansia tersebut dapat merangsang kepedulian dan partisipasi masyarakat.

Kebijakan Walikota merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan daerah yang maju baik untuk masyarakat didalam Kota maupun Luar Kota. Sudah tentu setiap kebijakan yang diberlakukan memiliki dampak positif untuk kehidupan masyarakat meskipun masih saja ada masyarakat yang memandang negatif terhadap kebijakan yang berlaku salah satunya seperti dalam penertiban PKL dimana ada saja pihak yang tidak setuju untuk pindah berjualan atau dilarang berjualan lagi, padahal bila diteliti lebih dalam penertiban PKL ini perlu dilakukan agar lingkungan lebih tertata dan nyaman.

## 2. Kebijakan Wali Kota dan Pemerintahan Kota Bandung Tahun 2013-2018

Dalam mewujudkan Bandung yang lebih maju, tentu setiap Walikota yang menjabat memiliki harapan dan keinginan yang sama, dimana keinginan tersebut tertuang dalam sebuah kebijakan atau program yang diberlakukan oleh Walikota, begitupun dengan Walikota Bandung dengan masa jabatan 2013-2018. Ridwan Kamil merupakan Walikota Bandung yang sangat terkenal akan kebijakan dan program kerjanya yang menjadikan Kota Bandung semakin menarik dimata orang di Kota Bandung sendiri maupun dari luar kota (Valentino, 2022). Selain itu Ridwan Kamil juga berhasil menarik perhatian bukan hanya kalangan orang tua tetapi juga menarik perhatian kaum muda karena keaktifannya dalam sosial media, sehingga kaum muda menganggap bahwa Kepemimpinan Ridwan Kamil mengikuti jamannya (Lestari, 2017). Adapun beberapa kebijakan atau program yang diberlakukan oleh Ridwan Kamil pada masa jabatannya sebagai Walikota Bandung yaitu sebagai berikut:

### 1) Bandung Sejuta Biopori

Ridwan Kamil melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan banjir di Bandung. Dalam upayanya untuk mengatasi banjir Ia mempunyai 4 gerakan lainnya, namun 1 gerakan ini yang bisa diterapkan dan dilakukan secara mudah, cepat dan sederhana, yaitu dengan mengadakan gerakan sejuta biopori (Pitriyanti, 2018). Gerakan biopori merupakan sebuah kegiatan paling sederhana tetapi memiliki manfaat yang luar biasa, selain itu gerakan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Bandung dalam membuat lubang resapan biopori diharapkan dapat mengurangi adanya genangan air yang bisa mencegah potensi

bencana banjir. Selain menerapkan gerakan biopori, Ridwan Kamil juga mencoba 4 upaya lainnya seperti membuat danau, menambah gorong-gorong, mendaur ulang air hujan serta membuat sumur resapan (Kuswandi, 2013a).

## 2) Bandung Smart City

Konsep *Smart City* merupakan cara yang sangat cerdas dan canggih, cara tersebut di upayakan untuk mengelola kota bisa dikerjakan tanpa terjun langsung ke lapangan (Kamil, 2014). Penerapan Bandung *Smart City* ini menjadi upaya perbaikan pelayanan publik kepada negara, serta dengan adanya Bandung *Smart City* ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Bandung. Terdapat beberapa tahap yang perlu dilakukan, dimulai dengan tahap awal yakni penelitian dan komunikasi dengan seluruh *stakeholder* (Deon, 2015). Tahap kedua yaitu pembangunan infrastruktur terkait perbaikan fasilitas internet dan perapihan kabel komunikasi yang ditujukan untuk komunitas, swasta, universitas, serta masyarakat Bandung. Fungsi dari *smart city* tersebut adalah untuk memonitor data-data yang ada di lapangan, contohnya data internet seperti youtube, kemacetan, cuaca, dan pergerakan lalu lintas (Pitriyanti, 2018).

## 3) Relokasi PKL (Pedagang Kaki Lima)

Sama seperti kebijakan yang telah diberlakukan oleh Walikota Bandung sebelumnya, untuk mewujudkan Kota Bandung yang nyaman dan tenang, penertiban PKL perlu dilakukan. Kota Bandung sebagai salah satu kota yang menarik orang-orang luar kota untuk menetap di Kota Bandung karena beranggapan dapat menunjang prasarana dan fasilitas, juga dalam hal sosial maupun ekonomi yang dianggap baik untuk menetap. Justru adanya urbanisasi yang terjadi menjadikan sumber daya manusia meningkat sedangkan taraf hidup ikut meningkat, juga mengakibatkan persaingan dalam masalah pekerjaan (Pitriyanti, 2018). Sehingga sebagian dari masyarakat tersebut menjadi PKL atau pedagang kaki lima. Pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) merupakan langkah awal yang diambil oleh Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung sesuai regulasi Kepwal Nomor 511.23/Kep.005-DisKUKM dan Perindag/2013. Satgasus ini terdiri dari berbagai SKPD dan bertujuan untuk membantu Wali Kota dalam menyusun dan membina PKL. Tugasnya melibatkan perencanaan, penyusunan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terkait PKL di Kota Bandung. Satgasus melakukan penilaian kebijakan PKL dan menetapkan prioritas posisi PKL yang akan ditata di beberapa titik Kota Bandung (Pitriyanti, 2018). Meskipun ada agenda prioritas, pemerintah bersedia untuk menyesuaikan rencana berdasarkan kebutuhan dan prioritas lainnya. Proses perundingan untuk penyusunan PKL dilakukan baik secara resmi maupun informal, tergantung pada posisi PKL itu sendiri. Waktu perundingan bervariasi, contohnya, perundingan di Teras Cihampelas memakan waktu 4 bulan, sementara di wilayah Dayang Sumbi memerlukan waktu lebih dari satu tahun.

## 4) Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK)

Penerapan otonomi wilayah memberikan kewenangan dan sumber daya lebih besar kepada Pemerintah Wilayah untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan publik melalui partisipasi aktif warga dalam pembangunan. Ridwan Kamil melihat lembaga kemasyarakatan sebagai sarana untuk mewujudkan potensi masyarakat di tingkat

lokal, dengan fokus pada orang yang paham kondisi wilayah untuk menetapkan prioritas pembangunan (Pitriyanti, 2018). Program PIPPK memberikan ruang bagi partisipasi warga dalam desentralisasi, inovasi, dan kerja sama, dengan pemberian dana 100 juta per lembaga untuk mencegah korupsi oleh pemerintah wilayah. PIPPK menggunakan dana APBD, dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp 197.424.325.859, dan penyerapan dana mencapai 95,32%.

Aktivitas lembaga dalam PIPPK melibatkan pembangunan infrastruktur, sosial, kebersihan, keamanan, keelokan, dan fasilitasi kelembagaan. Tahapan implementasi PIPPK melibatkan komunikasi di tingkat RW, Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota. Warga merasakan manfaat percepatan pembangunan dari pemerintah, terutama dalam infrastruktur, tanpa harus menunggu proses panjang dari pemerintah kota melalui delegasi kewenangan camat dan lurah. Awalnya, fokus PIPPK adalah pada pembangunan infrastruktur, dan kesuksesan dalam kebersihan terbukti dengan penerimaan Piala Adipura Kota Bandung selama tiga tahun berturut-turut. Selain itu, terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Bandung, dengan peringkat awal di Provinsi Jawa Barat dan peringkat 17 di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

## **B. Dampak Perkembangan Politik terhadap Kota Bandung (2008-2018)**

Kebijakan merupakan langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk membentuk masyarakat yang terstruktur baik lingkungannya maupun masyarakat itu sendiri. Menurut Anderson, kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dilaksanakan oleh individu atau bersama-sama secara berkelompok dalam memecahkan suatu permasalahan (Burdiadjo, 1982). Selain itu menurut Kaplan dan Lasswell, untuk mencapai program yang tertata dan terarah, sesuai nilai-nilai, tujuan dan tindakan maka diperlukan suatu kebijakan (Fisip Universitas Pattimura, 2012). Setiap pemerintah negara tentu memiliki kebijakan untuk membentuk masyarakat yang sejahtera.

Sebagai Walikota yang mempunyai perananan untuk menggerakkan perubahan di daerahnya tentu harus memiliki kebijakan. Setiap periode Walikota Bandung tentu mempunyai kebijakan yang berbeda-beda baik kebijakan baru maupun meneruskan dari periode sebelumnya. Kebijakan yang diterapkan di Kota Bandung tentu mengalami perkembangan disetiap periodenya dan memberikan dampak tersendiri terhadap masyarakat. Salah satu kebijakan di Kota Bandung yang mengalami perkembangan di dua periode Walikota adalah Penertiban dan Penataan PKL (pedagang kaki lima). Sebagai salah satu kota yang menarik pengunjung, tentu menjadikan adanya kesempatan bagi masyarakat untuk memajukan ekonomi keluarganya masing-masing, salah satu pekerjaannya yaitu sebagai PKL. PKL di Kota Bandung dapat dijumpai di sekitar jalan yang menjadi iconic masyarakat dan tempat yang sering didatangi pengunjung seperti Alun-alun Kota Bandung.

Sebagai Walikota Bandung periode 2008-2013, Dada Rosada memiliki kebijakan untuk menertibkan PKL yaitu dengan cara memberikan kompensasi sekitar 2.25M. Pemberian dana terhadap para PKL ini merupakan langkah dalam membantu PKL untuk melanjutkan usahanya di tempat lain yang lebih layak dan dilakukan pula penertiban dan

pemulangan PKL yang masih tetap berdagang di sekitar jalan Kota Bandung. Kebijakan terhadap penertiban dan penataan PKL di Kota Bandung juga dilakukan oleh Walikota Ridwan Kamil (2013-2018). Dalam usaha untuk menertibkan PKL yang masih saja berdagang di berbagai pusat Kota Bandung, Walikota dan Pemerintah membentuk Satgasus (Satuan Tugas Khusus) sebagai langkah awal untuk menertibkan dan menata PKL. Satgasus melakukan penilaian kebijakan terhadap PKL dan menata posisi PKL yang akan ditata di beberapa titik Kota Bandung, dengan posisi yang menjadi prioritas yaitu PKL Purnawarman, PKL BIP, PKL Dayang Sumbi, PKL Otto Iskandardinata dan PKL Cicadas, namun posisi yang diprioritaskan dapat bertambah sesuai kebutuhan.

Kebijakan penertiban dan penataan PKL oleh Walikota Bandung masa jabatan 2008-2013 dan masa jabatan 2013-2018 sama-sama memiliki dampak tersendiri bagi masyarakat Kota Bandung. Dampak yang dialami masyarakat terutama PKL dengan adanya penerapan Kebijakan penertiban dan penataan PKL, dapat dilihat dari segi positif dan negative. Segi positif dari penerapan kebijakan tersebut bagi PKL yaitu adanya penataan PKL untuk berjualan secara tertata dengan tempat yang layak, sedangkan dilihat dari segi negatifnya PKL merasa bahwa pemerintah membatasi pedagang untuk berjualan di tempat yang menjadi pusat di Kota Bandung bahkan pedagang dari luar Kota Bandung ada yang terpaksa dipulangkan karena dianggap melanggar kebijakan dengan terus berjualan di pinggir jalan. Bagi masyarakat yang bukan PKL merasa bahwa dengan diterapkannya penertiban PKL dapat mengurangi kepadatan dan kemacetan jalan dan sampah yang berserakan dari aktivitas jual beli di pinggir jalan Kota Bandung sehingga pengguna jalan lebih nyaman dan aman (Wicaksono & Rachmawati, 2015). Selain itu, sejumlah PKL mengatakan bahwa penataan lokasi PKL yang diprogramkan oleh kedua Walikota tersebut tidak tercipta secara maksimal, bahkan malah terjadi pembiaran terhadap lokasi PKL yang semakin padat oleh pedagang (Ispranoto, 2018).

Selain kebijakan terhadap PKL, masyarakat Kota Bandung juga merasakan berbagai dampak dari perkembangan kebijakan politik yang diterapkan oleh Walikota dan Pemerintah Kota Bandung, baik dari segi positif maupun negatif. Berbagai inovasi dalam kebijakan Walikota sangat bervariasi dan tentu memberikan pengaruh tersendiri bagi warga misalnya Program LLI Nyaah Ka Kolot yang diberlakukan oleh Walikota Bandung Dada Suhada (2008-2013) yang cukup berdampak terhadap masyarakat, dimana program ini memberikan sejumlah bantuan berupa hunian, materi dan kebutuhan sehari-hari untuk lansia-lansia di Kota Bandung yang membutuhkan bersama Bawaku Lansia Kota Bandung, sehingga program ini membuka kesadaran masyarakat Kota Bandung akan pentingnya menghargai dan menghormati orang tua serta mengetahui perilaku beradab yang harus dilakukan terhadap orang tua (Hari, 2016). Selain itu, dengan adanya program tersebut membantu sejumlah lansia yang tinggal sebatang kara untuk mendapatkan perhatian yang sudah seharusnya dirasakan diumurnya yang sudah senja.

Inovasi program dan kebijakan Walikota Bandung lainnya yang dapat mendorong masyarakat Bandung untuk lebih memperhatikan lingkungan adalah Program Bandung Sejuta Biopori yang diberlakukan oleh Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung (2013-2018). Berbagai Instansi Perusahaan juga ikut berpartisipasi dalam program tersebut sebagai sponsor kegiatan. Dalam mewujudkan Program Bandung Sejuta Biopori

pemerintah dan beberapa pihak yang bekerjasama mengadakan lomba kebersihan lingkungan dengan hadiah yang tentunya menarik minat masyarakat, dimana penilaian dilakukan berdasarkan kekompakan masyarakat dalam gotong royong, kreatifitas dalam mengolah limbah, dan tentunya lubang resapan biopori menjadi tolak ukur penilaian lomba (Kuswandi, 2013b). Lomba yang diadakan tersebut berhasil memengaruhi masyarakat Kota Bandung untuk mewujudkan Bandung yang bersih dari sampah dan hijau asri. Selain itu penerapan program tersebut dapat mencegah terjadinya banjir di beberapa wilayah Bandung yang kerap mengalami banjir akibat luberan air dari sungai Ciliwung.

Walikota Bandung telah sukses dalam membangun Program Bandung Kota Kreatif dengan fokus pada nilai budaya, keragaman, dan kreativitas. Mereka memanfaatkan keunikan kota dan menggalang komunitas kreatif melalui Bandung Creative City Forum (BCCF) untuk menciptakan kolaborasi yang kuat (Fitriyani, 2012). Akulturasi budaya dari berbagai wilayah Indonesia telah memperkaya kota ini, sementara perkembangan teknologi informasi juga telah berkontribusi pada ciptaan budaya kontemporer Bandung yang istimewa. Lingkungan yang kondusif dan ukuran kota yang tidak terlalu besar memberikan keleluasaan bagi warga untuk berinteraksi dan berkreasi. Semangat kreatif ini telah mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif lokal Bandung yang memiliki potensi besar. Sektor ekonomi kota terbagi menjadi tiga, meliputi sektor basis, ekonomi lokal, dan sektor informal, dengan kontribusi yang signifikan dari perdagangan, hotel, dan restoran. Kebijakan yang diterapkan oleh Walikota Bandung baik inovasi baru maupun melanjutkan dari periode sebelumnya tentu mengalami perkembangan dan berdampak langsung terhadap masyarakat baik itu dipandang negative maupun positif. Tentu tidak semua masyarakat akan setuju terhadap keputusan dari pemerintah, namun dengan adanya berbagai kebijakan tersebut menunjukkan kepedulian pemerintah dan Walikota terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Bandung baik dalam segi budaya, social maupun lingkungan yang dirancang secara strategis dan membutuhkan dukungan dan partisipasi langsung dari masyarakat. Pada era Dada Suhada, Program Kota Bandung sebagai kota kreatif masih menjadi gagasan dan dikembangkan oleh Ridwan Kamil pada masa jabatannya. Kota Bandung juga berhasil diakui oleh UNESCO sebagai kota kreatif yang diajukan oleh dirinya (Miftah, 2016).

Kebijakan yang diterapkan oleh Walikota Bandung baik inovasi baru maupun melanjutkan dari periode sebelumnya tentu mengalami perkembangan dan berdampak langsung terhadap masyarakat baik itu dipandang negative maupun positif. Tentu tidak semua masyarakat akan setuju terhadap keputusan dari pemerintah, namun dengan adanya berbagai kebijakan tersebut menunjukkan kepedulian pemerintah dan Walikota terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Bandung baik dalam segi budaya, social maupun lingkungan yang dirancang secara strategis dan membutuhkan dukungan dan partisipasi langsung dari masyarakat.

## Simpulan

Walikota Kota Bandung Dada Rosada (2008-2013) dan Ridwan Kamil (2013-2018). Keduanya memiliki fokus pada penataan kota, peningkatan pelayanan publik, dan perbaikan infrastruktur dengan kebijakan yang berbeda-beda. Pada periode Dada Rosada,

terdapat penekanan pada penertiban PKL, penataan angkutan umum dengan SPM Trans Metro Bandung, serta program pemberdayaan lansia dengan program "Nyaah ka Kolot". Kebijakan penertiban PKL dilakukan secara manusiawi dengan kompensasi kepada PKL untuk pindah ke tempat yang lebih layak, sementara SPM Trans Metro Bandung memberikan akses transportasi yang teratur dan terjangkau bagi masyarakat.

Sementara itu, Ridwan Kamil pada periode 2013-2018 membawa inovasi dengan gerakan "Bandung Sejuta Biopori" untuk mengatasi banjir, konsep "Bandung Smart City" untuk meningkatkan pelayanan publik dengan penggunaan teknologi, relokasi PKL dengan pembentukan Satuan Tugas Khusus, dan program PIPPK untuk memberdayakan wilayah dengan partisipasi aktif warga dalam pembangunan.

Kedua Walikota menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kondisi kota, namun dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Dada Rosada lebih menekankan pada penataan fisik kota dan peningkatan layanan transportasi publik, sementara Ridwan Kamil lebih fokus pada inovasi teknologi, partisipasi aktif warga, dan pembangunan wilayah secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, perkembangan politik di Kota Bandung dari tahun 2008 hingga 2018 telah membawa berbagai kebijakan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan infrastruktur kota. Meskipun beberapa kebijakan memberikan dampak positif, ada juga aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya menguntungkan dari segi teknis, tapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Menariknya, perkembangan politik di Kota Bandung selama rentang waktu tersebut menunjukkan bahwa setiap periode kepemimpinan memiliki fokus dan kebijakan yang berbeda-beda, yang pada akhirnya membentuk pola perkembangan kota secara keseluruhan. Dari penertiban PKL hingga penerapan konsep Smart City, setiap kebijakan tersebut memberikan kontribusi pada perubahan sosial, ekonomi, dan infrastruktur kota Bandung.

## Daftar Pustaka

- Burdiadjo, M. (1982). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia.
- Deon. (2015). Command Center, wujudkan Bandung Smart City. *Kominfo.go.id*.  
[https://www.kominfo.go.id/content/detail/5066/command-center-wujudkan-bandung-smart-city/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/5066/command-center-wujudkan-bandung-smart-city/0/berita_satker)
- Deon. (2015). Command Center, wujudkan Bandung Smart City. *Kominfo.go.id*.  
[https://www.kominfo.go.id/content/detail/5066/command-center-wujudkan-bandung-smart-city/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/5066/command-center-wujudkan-bandung-smart-city/0/berita_satker)
- E., B. L. (2019). Tactical distribution in local funding: The value of an aligned mayor. *European Journal of Political Economy*, 56, 74–89.  
<https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.07.006>
- Egner, B. (2018). Mayors and Political Parties. *Governance and Public Management*, 327–358. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-67410-0\\_11](https://doi.org/10.1007/978-3-319-67410-0_11)

- Einstein, K. (2018). Mayors, partisanship, and redistribution: Evidence directly from U.S. mayors. *Urban Affairs Review*, 54(1), 74–106. <https://doi.org/10.1177/1078087416674829>
- Fisip Universitas Pattimura. (2012). Buku Ajar Bagi Mahasiswa Semester VII 2012-2013 Prodi Ilmu Pemerintahan. Dalam Unpati.ac.id.
- Fitriyani, F. (2012). Peran Komunitas Dalam Pengembangan Kota Kreatif, Studi Kasus: Identifikasi Kekuatan Kolaboratif. *Jurnal PPTIK ITB*.
- Gea, R. K. (2018). Implementasi Kebijakan Walikota Bandung Nomor 704 tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pengoperasian Angkutan Umum Massal Trans Metro Bandung. Repository Unikom.
- Hari. (2016). Wali Kota Bandung, H. Dada Rosada Memulai Program LLI Jabar “Nyaah Ka Kolot” Kota Bandung. <https://www.bandung.go.id/news/read/1383/wali-kota-bandung-h-dada-rosada-memulai-program-lli-jabar-nyaah-ka-kolot-kota-bandung>
- Heinelt, H. (2018). Local Government Systems: Grasping the Institutional Environment of Mayors. *Governance and Public Management*, 19–78. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-67410-0\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-319-67410-0_2)
- Ispranoto, T. (2018). Sejak Era Dada Rosada Hingga Ridwan Kamil, PKL Cicadas Di-PHP-in. *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4269767/sejak-era-dada-rosada-hingga-ridwan-kamil-pkl-cicadas-di-php-in>
- Kamil, P. (2014). Model Peningkatan Kualitas Layanan Publik Walikota Bandung Ridwan Kamil. Artikel Unisba.
- Keputusan Walikota Kota Bandung Nomor 511.23/Kep.005-DISKUKM dan Perindag/2013 Tentang Pembentukan satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan PKL.
- Kona, A. (2019). Covenant of mayors: Local energy generation, methodology, policies and good practice examples. *Energies*, 12(6). <https://doi.org/10.3390/en12060985>
- Kona, A. (2021). Global Covenant of Mayors, a dataset of greenhouse gas emissions for 6200 cities in Europe and the Southern Mediterranean countries. *Earth System Science Data*, 13(7), 3551–3564. <https://doi.org/10.5194/essd-13-3551-2021>
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah Edisi Kedua*. PT. Tiara Wacana Yogya.
- Kuswandi, R. (2013a). Ridwan Kamil Luncurkan Gerakan Sejuta Biopori. *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2013/12/20/1214497/Ridwan.Kamil.Luncurkan.Gerakan.Sejuta.Biopori>
- Lestari, P. (2017). Kepemimpinan Transformatif Dalam Membangun Budaya. *Integralistik*, 28(1), 40–48. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v28i1.11810>
- Lu, J. (2020). Characteristics, exchange experience, and environmental efficiency of mayors: Evidence from 273 prefecture-level cities in China. *Journal of Environmental Management*, 255. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109916>
- Miftah. (2016, Agustus 13). Kota Bandung Masuk Dalam Jaringan Unesco Creative Cities Network (UCCN). <https://www.bandung.go.id/news/read/2722/kota-bandung-masuk-dalam-jaringan-unesco-%20creative-cities-network-uccn>
- Nambo, A. B., & Puluhi, M. R. (2005). *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)*. XXI.

- 
- Noor, H. (2001). Telaah Tentang Pelaku Politik dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat. *Schema Journal of Psychological Research*, 1.
- Parinduri, A. (2022). Sejarah Peristiwa Bandung Lautan Api: Penyebab, Kronologi dan Tokoh. Dalam *Tirto.id*. <https://tirto.id/sejarah-peristiwa-bandung-lautan-api-penyebab-kronologi-tokoh-gajf>
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04/Perda/2011 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL.
- Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 265/PERWALI/2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah Dan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- Pitriyanti, D. (2018). Kepemimpinan Ridwan Kamil Di Kota Bandung Tahun 2013-2018: Kajian Inovasi Kebijakan Kepemimpinan Adaptif. *Research Gate Net*.
- Pu, Z. (2018). Economic growth, environmental sustainability and China mayors' promotion. *Journal of Cleaner Production*, 172, 454–465. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.162>
- Purtle, J. (2018). US mayors' and health commissioners' opinions about health disparities in their cities. *American Journal of Public Health*, 108(5), 634–641. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2017.304298>
- Qin, L. (2020). Imaging and Monitoring Temporal Changes of Shallow Seismic Velocities at the Garner Valley Near Anza, California, Following the M7.2 2010 El Mayor-Cucapah Earthquake. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 125(1). <https://doi.org/10.1029/2019JB018070>
- Valentino, I. R. (2022). Analisis Kepemimpinan Ridwan Kamil Sebagai Wali Kota Bandung (2013-2018). *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Wicaksono, K. W., & Rachmawati, T. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. *Journal Unpar ac.id*.